



## Anggaran OPD Dipangkas hingga 25 Persen

### Wako Sampaikan LKPj Tahun Anggaran 2020

**PONTIANAK, TRIBUN** - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2020, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Pontianak, Senin (29/3).

Edi menyampaikan bahwa refocusing atau pembatalan dan realokasi anggaran berdampak pada berbagai sektor, terutama capaian target pembangunan tahun 2020. Sebagaimana, refocusing dan realokasi anggaran menurutnya bertujuan untuk percepatan penanganan Covid-19. Akibat dari pandemi Covid-19 mengakibatkan target yang sudah ditetapkan terkendala.

"Ada beberapa target yang harus disesuaikan, baik yang tercapai dan melebihi target maupun yang tidak mencapai target. Pembangunan infrastruktur saat ini masih terus berjalan meskipun ada beberapa penundaan

akibat pemotongan anggaran atau target yang tidak tercapai. Sehingga terjadi penundaan terhadap program yang sudah dialokasikan," ujar Edi usai menyampaikan LKPj.

Lebih lanjut diungkapkannya, penyesuaian itu berdampak pula pada kinerja terutama tingkat pengangguran terbuka yang meningkat. Angka pengangguran di Kota Pontianak sebelumnya tercatat di angka 9,2 persen, kini naik menjadi 12,3 persen.

Ia menilai, dari hal tersebut berpengaruh terhadap investasi akibat melemahnya daya beli masyarakat. "Tapi dari sisi tingkat kemiskinan di Kota Pontianak justru terjadi penu-

runan. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,49, tertinggi di Provinsi Kalbar. Sementara angka harapan hidup juga meningkat menjadi 72,68," ujarnya.

Selanjutnya, terkait kondisi keuangan daerah Kota Pontianak, menurutnya tergantung dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus



TRIBUN/OKI  
**LKPJ** - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan LKPj Tahun Anggaran (TA) 2020 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Pontianak, Senin (29/3).

(DAK) yang digelontorkan pemerintah pusat, termasuk transfer daerah lainnya serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pemasukan PAD dari beberapa sektor memang terjadi penurunan akibat adanya pembatasan di masa pandemi. Misalnya pajak hotel dan restoran, jasa dan hiburan. Tentunya hal itu berdampak menurunnya target PAD kita," jelasnya.

■ Bersambung ke hal. 10



Menurut Edi, kondisi keuangan daerah juga tidak terlepas dari adanya pemotongan DAU pusat yang dilakukan oleh Kementerian untuk alokasi penanganan pandemi Covid-19 sebesar 8 persen. Kemudian berdampak pula terhadap program-program Pemerintah Kota Pontianak secara keseluruhan, akibat adanya pemotongan dan perhitungan ulang termasuk defisit.

“Untuk mengoreksi program dan anggaran, kita melakukan pemotongan anggaran di lingkup OPD dengan nilai bervariasi antara 5 hingga 25 persen. Sehingga kebijakan tersebut mengakibatkan

adanya penyesuaian pada APBD Perubahan. Perubahan ini sifatnya penyempurnaan dan penyesuaian,” ucapnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas LKPj yang telah disampaikan oleh Wali Kota Pontianak. “Kami DPRD sebentar lagi akan membentuk Pansus LKPJ untuk menilai kinerja kepala daerah. Mana yang sudah tercapai dan mana yang belum, itu yang akan kami telaah selama satu bulan ini,” ucapnya.

Pihaknya juga akan meminta Wali Kota Pontia-

nak untuk menyampaikan data-data capaian target yang sudah mencapai 100 persen maupun yang belum tercapai. Setelah itu pansus akan mengeluarkan rekomendasi. Namun sebelum itu, pihaknya juga akan menanyakan terlebih dahulu terkait rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun anggaran 2019 lalu.

“Apakah sudah dilaksanakan atau belum, hal itu menjadi penting karena rekomendasi ini akan menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kebijakan wali kota untuk mengambil langkah ke depan,” pungkasnya. **(oki)**